PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI KASUS DI 6 PROVINSI INDONESIA PERIODE 2015-2024)

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

NINGSIH DWI SETIANI

NIM. B1011221036

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Ningsih Dwi Setiani
NIM	: B1011221036
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	: Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus di 6 Provinsi Indonesia Periode 2015-2024)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Proposal / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Proposal / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 10 Juni 2026



Ningsih Dwi Setiani

NIM. B1011221036

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Ningsih Dwi Setiani
NIM	: B1011221036
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Tanggan Ujian	: Rabu, 4 Maret 2026
Judul Proposal / TA	: Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus di 6 Provinsi Indonesia Periode 2015-2024)

Menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya saya sendiri yang disusun sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Sefuruh data dan referensi yang digunakan telah dicantumkan secara jujur dan sesuai kaidah penulisan ilmiah, serta tidak mengandung unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadspp etika atau peraturan akademik Universitas Tanjungpura. saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Surat ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi yang saya tempuh.

Pontianak, 10 Juni 2026

Ningsih Dwi Setiani
NIM. B1011221036

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan Pendapatan
(Studi Kasus di 6 Provinsi Indonesia Periode 2015-2024)

Penanggung Jawab Yuridis

Ningsih Dwi Setiani
B1011221036

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 4 Maret 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si.	28/4-2026	
		NIP 196205251987031002		
2.	Ketua Penguji	Prof. Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A.	27/4-2026	
		NIP 196707071992021001		
3.	Anggota Penguji	Dr. Restiatun, S.E., M.Si.	17/4-2026	
		NIP 197505212002122001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 03 JUN 2026
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

MOTTO

"Ombakku besar, perahuku kecil. Tapi Tuhan Yesus Terlebih Besar"

Yesaya 41:10

"Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memengang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan"

"Fearless is not the absence of fear. It's being afraid and doing it anything'

~Taylor Swift~

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa anugerah, hikmat, dan kekuatan yang Tuhan berikan, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami tantangan dan kesulitan, namun melalui kekuatan, hikmat, dan penghiburan yang Tuhan berikan, penulis dapat melewati setiap proses dengan penuh pengharapan. Oleh kasih dan anugrahnya yang begitu luar biasa judul skripsi ini berjudul **"Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus di 6 Provinsi Indonesia Periode 2015-2024)".**

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan berbagai kemudahan, dukungan, serta fasilitas yang memungkinkan penulis untuk menempuh dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
2. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Yanto, S,E., M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Beliau telah memberikan banyak ilmu, motivasi dan tidak pernah menyulitkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Terimakasih pak untuk setiap arahan dan masukannya didalam setiap proses bimbingan yang ada, sehingga saya ada sampai dititik ini, Tuhan memberkati bapak selalu.
6. Bapak Prof. Dr.Edy Suratman, S.E., M.A. selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan banyak pelajaran dan masukan selama penulis kuliah dan memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
7. Ibu Dr. Restiatun, S.E., M.Si. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat kepada penulis terkhusus kepada para Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses administrasi demi kelancaran Tugas Akhir penulis.
10. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Papa Yus Suhardi Kencus dan Mama Idut, dua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan, ketulusan dan doanya setiap harinya. Terimakasih untuk kasih sayang setiap harinya, dengan segala keterbatasan yang ada, Papa dan Mama selalu menjadi sumber kekuataan, penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab Papa dan Mama untuk keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk dapat mengenyam pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan iman bersama Tuhan bahwa semuanya bisa terlewati. Terimakasih untuk semuanya pa ma anak kedua gadis satu-satumu ini bisa sampai dititik ini. Besar harapan penulis semoga papa dan mama selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih dimasa yang akan datang
11. Kepada saudara laki-laki ku tersayang Krestianus Setiawan,S.IP & Adik Viktordes Deka Agustian, Terimakasih karena telah menjadi abang dan adik yang selalu ada dan tempat bertumbuh dan bermain bersama, bahkan terimakasih atas setiap canda dan tawa yang selalu menghibur. Terimakasih untuk kasih sayangnya, dukungan bahkan supportnya selama ini dan menjadi tempat penulis bertukar pikiran. Terima kasih telah bekerja keras dan selalu bertahan.
12. Kepada semua keluarga besar penulis, Terima kasih sudah banyak memberikan dukungan, doa, semangat, dan bantuan selama masa perkuliahan.
13. Kepada Sahabat Penulis sejak maba dalam perkuliahan ini, *Ciwi- Ciwi 3N* Ni Putu Nanda Eka Putri dan Nadiyah Fajriani, terimakasih sudah selalu membersamai selama proses perkuliahan ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis serta turut memberikan semangat dan warna dalam menempuh berbagai proses hingga tahap ini.
14. Kepada sahabat penulis sejak SMA, *P Info Bagi Jawaban Dong* (Detia Juliana Dewi dan Rio Stheven Ardesto). Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, dan dukungan yang terus terjaga hingga saaat ini.
15. Kepada Pamela Vidya Mustari, terima kasih atas kebersamaan dan dukugannya selama ini, terima kasih untuk hak-hal baik setiap harinya. Terima kasih sudah selalu berbagi cerita canda dan tawa, sudah selalu ada dan selalu gas kemana saja.
16. Jin, Chairil, Agustina, Sanah, Aurel, Kalnis dan Bagus, teman-teman

KKM. Terima kasih selalu memberikan ruang aman untuk penulis berbagi cerita dan pengalaman meskipun tidak selalu dapat ditemui bersama.

17. Dzaki, Dinia, Indah, Ulan dan Syapna, teman-teman Public Relation yang menjadi tempat bertumbuh dalam bagian ini. Terima kasih sudah selalu menemani selama 1 periode di KSPM.
18. Odilia Leoni, Tia, Selvi Marsela, Safira Lia, dan Nindi sahabat penulis sejak SD meskipun tidak selalu berada disisi penulis karena terpisah jarak, namun tak pernah berhenti memberikan dukungan yang berarti selama ini. Terima kasih karena tetap tinggal dalam cerita hidup penulis, menjadi bagian dari kenangan yang menguatkan, serta menghadirkan rasa pulang yang sederhana namun berarti.
19. Kepada teman bahkan yang sudah kuanggap seperti adik Sarah Adelia Irene Simorangkir, terimakasih sudah selalu menemani disela-sela kesepian, terimakasih udah selalu menjadi teman ngopi, teman cerita dan teman jalan dimana saja dan kapan saja.
20. Untuk adik-adikku tersayang Quinsa Nesa Shalom, Aveolela Anwa Wan Quinell, Stepane Natasya, Kayren Manuella Darra, Audrey Anwa Twi Quela. Terimakasih sudah hadir dan tumbuh bersama. Terimakasih untuk setiap canda, tawa & tingkah lucunya, terima kasih juga sudah selalu ada menjadi teman jalan-jalan, tempat cerita & pulang.
21. Dan yang terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri Ningsih Dwi Setiani. Terima kasih untuk setiap perjuangan yang tidak terlihat, untuk air mata yang tidak ditumpahkan didepan orang lain, dan untuk setiap seruan doa-doa yang dipanjatkan. Terima kasih karena tetap bertahan dan melangkah, ditengah banyaknya tantangan dan rintangan, meskipun diiringi dengan banyak keraguan. Pada akhirnya, kita berhasil.

PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN

(STUDI KASUS DI 6 PROVINSI INDONESIA PERIODE 2015-2024)

[1] Ningsih Dwi Setiani

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of unemployment rates, provincial minimum wages (UMP), and agricultural sector contributions on income inequality (a case study in six Indonesian provinces for the period 2015-2024) using secondary data from the Central Statistics Agency and the Ministry of Manpower. This research was conducted using a quantitative approach, which was analyzed through a random effect model with the help of Eviews 13 software. The results of the study show that the unemployment rate, provincial minimum wage, and contribution of the agricultural sector have a negative and significant effect on income inequality in six Indonesian provinces. This study proves that an increase in unemployment, minimum wages, and the contribution of the agricultural sector can collectively reduce income inequality.

Keywords: *Unemployment Rate, Provincial Minimum Wage, Contribution of the Agricultural Sector, Income Inequality.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus di 6 Provinsi Indonesia Periode 2015-2024) dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yang dianalisis melalui *random effect model* dengan bantuan perangkat lunak *Eviews 13*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, upah minimum provinsi, dan kontribusi sektor pertanian memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dienam provinsi Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan pengangguran, upah minimum, dan kontribusi sektor pertanian secara bersama-sama dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, Kontribusi Sektor Pertanian, Ketimpangan Pendapatan

[1] **b1011221036@student.untan.ac.id**

PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN

(STUDI KASUS DI 6 PROVINSI INDONESIA PERIODE 2015-2024)

RINGKASAN

1. Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan utama di enam provinsi penelitian, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat, yang secara konsisten termasuk provinsi dengan nilai Gini Ratio tertinggi di Indonesia hingga tahun 2024. Kondisi ini tidak terlepas dari perbedaan karakteristik pasar tenaga kerja antarprovinsi, khususnya tingkat pengangguran yang bervariasi, penerapan upah minimum provinsi yang belum merata, serta perbedaan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah. Provinsi dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi cenderung menghadapi keterbatasan akses pendapatan bagi sebagian penduduk, sementara kenaikan upah minimum lebih banyak menjangkau pekerja sektor formal dan belum sepenuhnya dirasakan oleh tenaga kerja sektor informal. Di sisi lain, sektor pertanian masih berperan penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok berpenghasilan rendah di beberapa provinsi, sehingga perbedaannya berpotensi memengaruhi distribusi pendapatan antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di keenam provinsi dipengaruhi oleh interaksi antara pengangguran, kebijakan upah minimum, dan peran sektor pertanian, sehingga diperlukan kajian empiris untuk memahami pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan.

2. Permasalahan

1. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi Indonesia tahun 2015-2024?
2. Apakah upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi Indonesia tahun 2015-2024?
3. Apakah kontribusi sektor pertanian berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi Indonesia tahun 2015-2024**?**

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi indonesia tahun 2015-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi Indonesia tahun 2015-2024
3. Untuk menganalisis pengaruh kontribusi sektor pertanian terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi indonesia tahun 2015-2024

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif deskriptif dengan objek penelitian 6 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2024. Variabel dalam penelitian ini

terdiri dari satu variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan dan variabel independen mencakup tingkat pengangguran, upah minimum provinsi, dan kontribusi sektor pertanian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa panel, terdiri atas time series dan cross section, yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan. Objek penelitian mencakup 6 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY Yogyakarta, Gorontalo, Papua dan Papua Barat. Menggunakan data panel dari 6 provinsi selama sepuluh tahun, penelitian ini menghasilkan 60 observasi.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil uji t menunjukkan ketiga variabel (tingkat pengangguran, upah minum provinsi dan kontribusi sektor pertanian) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran yang terjadi pada suatu daerah tidak selalu menaikkan ketimpangan pendapatan justru diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan dan Kontribusi Sektor Pertanian berperan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, terutama ketika sektor pertanian mampu berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa di keenam provinsi, tingkat pengangguran, UMP dan sektor pertanian sama-sama dapat menurunkan ketimpangan.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, upah minimum provinsi, dan kontribusi sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi penelitian. Pengaruh negatif tingkat pengangguran mengindikasikan bahwa penurunan ketimpangan tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan, melainkan dapat terjadi akibat melemahnya pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi. Upah minimum provinsi berperan dalam memperbaiki distribusi pendapatan, meskipun efektivitasnya bergantung pada struktur pasar tenaga kerja dan tingkat kepatuhan sektor usaha. Sementara itu, sektor pertanian terbukti berkontribusi dalam menekan ketimpangan pendapatan melalui perannya sebagai penyerap tenaga kerja dan sumber pendapatan yang relatif lebih merata. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat implementasi kebijakan upah minimum terutama pada sektor formal dan informal, serta meningkatkan produktivitas dan peran sektor pertanian guna mendukung pemerataan pendapatan yang lebih inklusif.

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

RINGKASAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
ABSTRAK **1**
1.PENDAHULUAN **2**
2.KAJIAN LITERATUR **6**
2.1.Tinjauan Teori 6
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan 6
2.1.2 Pengangguran 7
2.1.3 Teori Ekonomi Tenaga Kerja 8
2.1.4 Teori Model Dua-Sektor Lewis 9
2.2 Kajian Empiris 9
2.2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan 9
2.2.2Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan 10
2.2.3 Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan Pendapatan 10
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 10
2.3.1 Kerangka Konseptual 10
2.3.2 Hipotesis Penelitian 11
3.METODE PENELITIAN **11**
3.1 Bentuk, Tempat dan Waktu Penelitian 11
3.2 Jenis dan Sumber Data 11
3.3 Variabel Penelitian dan Definsi Operasional 12
3.4 Metode dan Alat Analisis 12
3.4.1 Pemilihan Model 13
3.4.2 Uji Hipotesis 14
4.HASIL DAN PEMBAHASAN **14**
4.1 Hasil Penelitian 14
4.1.1 Pemilihan Model 14
4.1.2 Estimasi Model Regresi Random Effect 15
4.1.3 Uji Hipotesis 16
4.2 PEMBAHASAN 17
4.2.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan 17
4.2.2 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan 19
4.2.3 Pengaruh Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Ketimpangan Pendapatan 20
5.SIMPULAN DAN REKOMENDASI **22**
5.1 Simpulan 22
5.2 Rekomendasi 22

DAFTAR RUJUKAN.....23
LAMPIRAN 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Gini Ratio 6 Provinsi Di Indonesia 2015 -2024 3
Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 6 Provinsi Di Indonesia 2015-2014.....4
Tabel 1. 3 Upah Minimum 6 Provinsi Di Indonesia 2015 – 2024 5
Tabel 1. 4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian 6 Provinsi di Indonesia 2015-2024.....6
Tabel 4. 1 Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik.....15
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Random Effect.....15
Tabel 4. 3 Hasil Uji t-statistik.....16
Tabel 4. 4 Hasil Uji F-statistik.....16
Tabel 4. 5 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Gini Ratio Tertinggi Indonesia Tahun 2024 2
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 11

PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI KASUS DI 6 PROVINSI INDONESIA PERIODE 2015-2024)

[1] Ningsih Dwi Setiani

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of unemployment rates, provincial minimum wages (UMP), and agricultural sector contributions on income inequality (a case study in six Indonesian provinces for the period 2015-2024) using secondary data from the Central Statistics Agency and the Ministry of Manpower. This research was conducted using a quantitative approach, which was analyzed through a random effect model with the help of Eviews 13 software. The results of the study show that the unemployment rate, provincial minimum wage, and contribution of the agricultural sector have a negative and significant effect on income inequality in six Indonesian provinces. This study proves that an increase in unemployment, minimum wages, and the contribution of the agricultural sector can collectively reduce income inequality.

Keywords: *Unemployment Rate, Provincial Minimum Wage, Contribution of the Agricultural Sector, Income Inequality.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus di 6 Provinsi Indonesia Periode 2015-2024) dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yang dianalisis melalui *random effect model* dengan bantuan perangkat lunak *Eviews 13*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, upah minimum provinsi, dan kontribusi sektor pertanian memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dienam provinsi Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan pengangguran, upah minimum, dan kontribusi sektor pertanian secara bersama-sama dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, Kontribusi Sektor Pertanian, Ketimpangan Pendapatan

[1] **b1011221036@student.untan.ac.id**

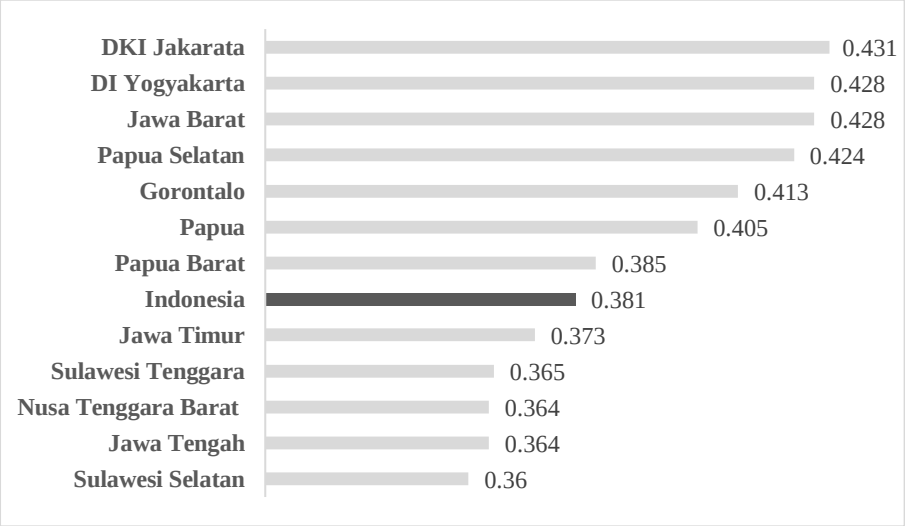
1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata. Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi adalah distribusi pendapatan yang merata di antara penduduk. Menurut Todaro & Smith (2011), tujuan utama pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan output perekonomian, tetapi juga mencakup pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Di Indonesia, masalah ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai daerah. Ketimpangan pendapatan mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga oleh negara maju, meskipun dalam konteks dan tingkat yang berbeda (Damanik et al., 2018).

Untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan ini, digunakan Indeks Gini yang merupakan ukuran berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan pendapatan yang sempurna, sementara 1 mencerminkan ketidaksetaraan pendapatan yang maksimal (Todaro & Smith, 2011). Berdasarkan data terkini, terdapat 6 Provinsi di Indonesia yang merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi, dengan nilai indeks gini berkisar antara 0,3 hingga 0,5. Berlandaskan pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dibawah ini, terdapat enam provinsi dengan angka ketimpangan tertinggi, daerah-daerah tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua. Kenam daerah selalu masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan ketimpangan tertinggi sejak tahun 2015, kemudian menempati posisi tertinggi di tahun 2024. Pada tahun 2022, DI Yogyakarta mencatatkan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi secara nasional. Sebaliknya, Provinsi kepulauan Bangka Belitung menempati posisi dengan ketimpangan terendah sebesar 0,235.

Gambar 1. 1 Gini Ratio Tertinggi Indonesia Tahun 2024



Sumber: BPS 2024, data diolah

Keenam provinsi yang menjadi objek penelitian memiliki kondisi fisik dan karakteristik wilayah yang beragam. DKI Jakarta merupakan wilayah metropolitan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dan menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional. Jawa Barat dan DI Yogyakarta memiliki karakteristik wilayah urban dan semi-urban dengan aktivitas industri, perdagangan, serta pendidikan yang dominan. Sementara itu, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat terletak di kawasan timur Indonesia dengan wilayah yang luas dan tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah.

Menurut Sart et al., (2024) wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi dan urbanisasi tinggi cenderung menghadapi ketimpangan pendapatan yang lebih besar akibat ketidakseimbangan kesempatan kerja dan distribusi sumber daya. Kondisi ini sesuai dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia, tetapi menghadapi masalah kesenjangan distribusi pendapatan yang tajam. Pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan ketimpangan, sementara kemiskinan dan pengangguran terbuka justru memperburuknya (Panggabean, 2024).

Tabel 1. 1 Gini Ratio 6 Provinsi Di Indonesia 2015 -2024 (Indeks)

Provinsi	Gini Ratio 6 Provinsi									
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
DKI Jakarta	0,421	0,397	0,409	0,390	0,391	0,400	0,411	0,412	0,431	0,431
Jawa Barat	0,426	0,402	0,393	0,405	0,398	0,398	0,406	0,412	0,425	0,428
DI Yogyakarta	0,420	0,425	0,440	0,422	0,428	0,437	0,436	0,459	0,449	0,428
Gorontalo	0,401	0,410	0,405	0,417	0,410	0,406	0,409	0,423	0,417	0,413
Papua Barat	0,428	0,401	0,387	0,391	0,381	0,376	0,374	0,384	0,370	0,385
Papua	0,392	0,399	0,398	0,398	0,391	0,395	0,396	0,393	0,386	0,405

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2024

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa ketimpangan pendapatan di keenam provinsi, Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta konsisten menjadi wilayah dengan ketimpangan tertinggi pada tahun 2024. Sebaliknya, Papua Barat memperlihatkan kecenderungan penurunan ketimpangan pendapatan selama periode pengamatan, sedangkan Papua relatif stabil. Gorontalo sempat mengalami peningkatan ketimpangan pada beberapa tahun, namun pada akhir periode menunjukkan penurunan meskipun belum bersifat substansial. Sementara itu, Jawa Barat menunjukan kecenderungan ketimpangan yang meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa proses pemerataan pendapatan di provinsi tersebut masih menghadapi tantangan.

Ketimpangan pendapatan yang masih tinggi di berbagai provinsi berkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja, khususnya tingkat pengangguran. Ketika pengangguran lebih banyak dialami oleh masyarakat miskin, kondisi ini akan menurunkan pendapatan kelompok tersebut sehingga jarak pendapatan dengan kelompok yang tetap bekerja semakin melebar dan ketimpangan cenderung meningkat. Namun, apabila pengangguran terjadi secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat, dampaknya terhadap ketimpangan tidak selalu memperlebar kesenjangan, karena penurunan pendapatan dialami oleh berbagai kelompok secara bersamaan (Istikharoh et al., 2020).

Berdasarkan Tabel 1.2 tingkat pengangguran terbuka secara umum menunjukan mengalami penurunan pada 2016, namun kembali meningkat tajam pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi nasional. Peningkatan tertinggi

terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada periode yang sama. Kondisi ini menggambarkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk tinggi dan tingkat urbanisasi tinggi lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Pada tahun 2024, Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam provinsi penelitian, sedangkan Gorontalo menunjukkan tingkat pengangguran terendah. DI Yogyakarta memperlihatkan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil dengan tingkat pengangguran yang konsisten rendah sepanjang periode pengamatan, walaupun sempat mengalami kenaikan pada masa pandemi. Sementara itu, Papua dan Papua Barat menunjukkan perubahan tingkat pengangguran yang bergerak naik–turun dari tahun ke tahun, namun secara umum tetap berada pada kisaran menengah dibanding provinsi lainnya.

Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 6 Provinsi Di Indonesia 2015-2014

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	7,23	6,12	7,14	6,65	6,54	10,95	8,5	7,18	6,53	6,21
Jawa Barat	8,72	8,89	8,22	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
DI Yogyakarta	4,07	2,72	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
Gorontalo	4,65	2,76	4,28	3,70	3,76	4,28	3,01	2,58	3,06	3,13
Papua Barat	8,08	7,46	6,49	6,45	6,43	6,8	5,84	5,37	5,38	4,13
Papua	3,99	3,35	3,62	3,00	3,51	4,28	3,33	2,83	2,67	6,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015- 2024

Upah minimum merupakan kebijakan yang bertujuan menjamin upah yang adil bagi pekerja serta mencegah kemiskinan di kalangan pekerja dengan memastikan terpenuhinya standar hidup minimum (Putriy & Nurhayati, 2024). Kebijakan ini terutama meregulasi tingkat upah bagi tenaga kerja di sektor formal, sehingga kelompok pekerja formal menjadi sasaran utama penerapannya dan perusahaan wajib mematuhi ketentuan upah sesuai regulasi yang berlaku. Pada umumnya, pekerja yang mampu memasuki lapangan kerja formal berasal dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi relatif lebih baik serta memiliki akses pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi. Karena itu ketika UMP meningkat, pendapatan pekerja formal cenderung ikut naik. Sebaliknya, pekerjaan di sektor informal tidak secara langsung terjangkau oleh regulasi UMP dan pelakunya umumnya berasal dari kelompok rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga kenaikan UMP tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan yang setara pada kelompok ini. Engbom dan Moser (2022) menjelaskan bahwa kenaikan UMP berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh struktur pasar tenaga kerja di suatu wilayah, terutama komposisi pekerja formal dan informal, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi upah, serta kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja.

Setiap tahun, pemerintah Indonesia menetapkan penyesuaian upah minimum di berbagai daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pekerja meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga memberikan dampak positif secara langsung bagi kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian, pekerja terdorong untuk bekerja lebih giat guna

memperoleh penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Santoso & Kristiyanto, 2021).

Tabel 1. 3 Upah Minimum 6 Provinsi Di Indonesia 2015 – 2024 (Juta Rupiah)

Provinsi	UMP Menurut Provinsi									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	2.700.000	3.100.000	3.355.750	3.648.036	3.940.973	4.276.350	4.416.187	4.641.854	4.901.798	5.067.381
Jawa Barat	1.000.000	2.250.000	1.420.624	1.544.361	1.668.373	1.810.351	1.810.351	1.841.487	1.986.670	2.057.495,00
DI Yogyakarta	988.500	1.182.510	1.337.645	1.454.154	1.570.923	1.704.608	2.788.826	1.840.916	1.981.782	2.125.897
Gorontalo	1.600.000	1.875.000	2.030.000	2.206.813	2.384.020	2.788.826	2.788.826	2.800.580	2.989.350	3.025.100
Papua Barat	2.015.000	2.237.000	2.421.500	2.667.000	2.934.500	3.134.600	3.134.600	3.200.000	3.282.000	3.393.000
Papua	2.193.000	2.435.000	2.663.647	3.000.000	3.240.900	3.516.700	3.516.700	3.561.932	3.864.696	4.024.270

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan, 2015-2024

Berdasarkan Tabel 1.3 upah minimum di enam provinsi mengalami peningkatan setiap tahun sepanjang periode 2015–2024. Kenaikan upah minimum paling tinggi terjadi di DKI Jakarta, dari Rp2.700.000 pada 2015 menjadi Rp5.067.381 pada 2024. DI Yogyakarta dan Jawa Barat cenderung memiliki upah minimum di bawah rata-rata nasional, meskipun tetap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Papua dan Papua Barat menunjukkan peningkatan upah minimum yang cukup konsisten, mencerminkan adanya kebijakan untuk menyesuaikan upah dengan kondisi sosial ekonomi wilayah tersebut.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor kunci dalam perekonomian Indonesia karena fungsinya tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai penopang kesempatan kerja dan sumber penghidupan masyarakat perdesaan (Ngadi et al., 2023). Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia tentu saja didorong oleh setiap provinsi yang memiliki kontribusi beberapa sektor yang dominan, seperti sektor pertanian, sektor indsutri, dan sektor jasa (Abduh, 2023). Perekonomian Indonesia dapat memperoleh manfaat dari peningkatan distribusi pendapatan jika industri pertanian yang kuat di negara ini terus bertumbuh (Suparman et al., 2024). Pemerintah diharapkan bisa memberikan kebijakan yang tepat sasaran untuk mendorong pertanian agar lebih produktif dan bermanfaat pada perekonomian daerah yang pada akhirnya membantu mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia (Sihite et al., 2025). Pada level regional, sektor pertanian di banyak provinsi masih berfungsi sebagai sektor basis karena cenderung menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah di berbagai wilayah Indonesia (Anggraeni et al., 2023).

Kontribusi sektor pertanian yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyaknya tenaga kerja yang terlibat di sektor ini atau adanya peningkatan pendapatan tenaga kerja yang bekerja di sektor ini, sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan (Abro et al., 2014). Karena peningkatan pendapatan rumah tangga perdesaan yang umumnya berada pada kelompok pendapatan bawah dapat memperkecil jarak pendapatan dengan kelompok yang bekerja di sektor non-pertanian.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa kontriubsi sektor pertanian di enam provinsi penelitian memperlihatkan variasi yang tajam selama periode 2015–2024. DKI Jakarta secara konsisten memiliki kontribusi sektor pertanian paling kecil dan cenderung menurun, mencerminkan struktur ekonomi yang sangat didominasi sektor non-pertanian seperti jasa dan industri. Jawa Barat juga menunjukkan kontribusi pertanian yang relatif kecil, namun pergerakannya berubah dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya dinamika struktur ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian. DI Yogyakarta

memperlihatkan kontribusi pertanian yang relatif stabil, menandakan bahwa sektor pertanian masih memegang peran cukup penting meskipun provinsi ini berkembang pesat pada sektor jasa, terutama pendidikan dan pariwisata.Gorontalo menjadi provinsi dengan kontribusi pertanian paling tinggi sepanjang periode pengamatan, menunjukkan bahwa perekonomian daerah tersebut masih bertumpu kuat pada sektor primer. Papua Barat pada awalnya berada pada tingkat kontribusi pertanian yang masih tergolong tinggi, tetapi menunjukkan kecenderungan menurun pada akhir periode. Sementara itu, Papua memiliki kontribusi pertanian yang relatif lebih besar daripada provinsi berbasis non-pertanian dan menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir pengamatan.

Tabel 1. 4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian 6 Provinsi di Indonesia 2015-2024 (Persen)

Provinsi	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
Jawa Barat	0,16	5,70	1,60	2,09	2,80	2,30	1,31	4,41	0,11	1,59
DI Yogyakarta	10,64	10,42	10,02	9,78	9,39	10,18	9,77	9,97	10,23	9,92
Gorontalo	37,00	37,22	38,01	38,64	38,93	38,79	38,92	38,00	37,74	37,29
Papua Barat	10,87	10,94	10,94	10,46	10,61	10,85	10,98	10,46	8,27	6,73
Papua	13,31	12,30	11,79	11,28	12,76	12,28	10,84	10,45	14,46	14,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2024

Menurut Rohmah et al., (2025) meskipun kebijakan upah minimum terus meningkat setiap tahun dan berbagai upaya pembangunan ekonomi telah dilakukan, hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran di beberapa provinsi, adanya perbedaan upah antarwilayah, serta ketimpangan pembangunan dan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya alam maupun sumber daya manusia masih menjadi masalah utama dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, perbedaan struktur ekonomi antarwilayah yang tercermin dari variasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masih menjadi tantangan serius. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, khususnya pada daerah-daerah yang masih menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif tinggi, agar hasil pembangunan dapat lebih merata dan inklusif di wilayah tersebut.